PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3390
Vol. 5, No. 3, November 2026



KLIENTELISME POLITIK DALAM KONTESTASI PILKADA: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS ATAS RELASI PATRON-KLIEN DAN MOBILISASI DUKUNGAN ELEKTORAL, DENGAN REFLEKSI KASUS KABUPATEN BONE

Andi Niniek Paryati[1], Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik[2*], Umiyati Haris[3], Nurul Sholeha[4]
[1,4] Universitas Andi Sudirman, Kabupaten Bone
[2]Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional
[3]Universitas Musamus
email: maharmuharramham@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-10-26
Revised : 2026-10-29
Accepted : 2026-11-02

KEYWORDS
Political Clientelism, Political Patronage, Patron-Client, Electoral Mobilization, Regional Head Election

KATA KUNCI
Klientelisme Politik, Patronase Politik, Patron-Klien, Mobilisasi Elektoral, Pilkada

ABSTRACT
Direct regional head elections since 2005 have not eliminated Indonesia's patronage democracy, yet patron-client literature remains scattered across cases, while studies on Bugis elections stress aristocratic legitimacy without linking it to broker research. This study aims to understand patron-client relations in regional elections, how candidates mobilize support through clientelistic networks, and their reflection in Bone Regency's elections. The study uses a systematic literature review following PRISMA 2020, via multi-database search under strict criteria yielding 23 studies, analyzed through deductive-inductive thematic synthesis and applied to secondary data on Bone's elections (2003-2024). Results show cultural-historical, electoral-transactional, and economic-political lenses converge into a pyramid-like layered patron-client network; mobilization proceeds through layered brokers, diverse resources, and incumbent advantage. In Bone, aristocratic legitimacy serves as an entry ticket, yet the 2024 election shows victory is determined more by networks linked to national power centers. It is concluded that clientelism works through three mutually reinforcing layers legitimacy, network, and transaction shifting across cycles.

ABSTRAK
Pilkada langsung sejak 2005 belum menghapus demokrasi patronase di Indonesia, namun literatur tentang relasi patron-klien masih tersebar per kasus, terkonsentrasi di Jawa-Sumatra, dan kajian Pilkada Bugis lebih menyoroti legitimasi bangsawan tanpa mengaitkannya dengan literatur broker. Penelitian ini bertujuan memahami relasi patron-klien dalam Pilkada, mekanisme mobilisasi dukungan melalui jaringan klientelistik, serta refleksinya pada dinamika Pilkada Kabupaten Bone. Penelitian menggunakan tinjauan literatur sistematis mengikuti PRISMA 2020, penelusuran multi-basis data dengan kriteria inklusi ketat menghasilkan 23 studi, dianalisis melalui sintesis tematik deduktif-induktif lalu diterapkan pada data sekunder Pilkada Bone 2003-2024. Hasil menunjukkan relasi patron-klien dipahami melalui lensa kultural-historis, elektoral-transaksional, dan ekonomi-politik yang bertemu dalam jaringan berjenjang menyerupai piramida; mobilisasi berlangsung lewat broker berlapis, beragam sumber daya, dan keunggulan petahana. Di Bone, legitimasi bangsawan menjadi tiket masuk kontestasi, namun Pilkada 2024 menunjukkan kemenangan kini lebih ditentukan jaringan yang terhubung ke pusat kekuasaan nasional. Disimpulkan klientelisme bekerja melalui tiga lapis legitimasi-jaringan-transaksi yang saling menguatkan dan terus bergeser antarperiode pemilihan.

1. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang mulai digelar pada 2005 sejatinya dimaksudkan untuk mendekatkan pemimpin daerah dengan warganya. Kepala daerah yang dipilih langsung diharapkan lebih bertanggung jawab kepada pemilih ketimbang kepada elite partai. Dua dekade kemudian, harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Para peneliti justru menggambarkan Indonesia sebagai demokrasi patronase, yakni demokrasi yang kompetitif tetapi digerakkan oleh pertukaran uang, barang, jabatan, dan proyek dengan dukungan politik (Aspinall & Berenschot, 2019; Berenschot, 2018).

Secara normatif, praktik tersebut sebenarnya telah dilarang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melarang calon dan tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lain untuk memengaruhi pemilih, sekaligus melarang kepala daerah mengganti pejabat dan menggunakan program pemerintah untuk menguntungkan pasangan calon sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (Republik Indonesia, 2016). Namun, penindakan politik uang oleh Bawaslu kerap terhambat oleh regulasi yang belum mendukung penegakan hukum (Fransisca *et al*., 2023). Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada juga terus berulang, terutama karena ikatan kekerabatan dan janji karier (Regif & Pattipeilohy, 2023). Pada saat yang sama, jumlah daerah dengan calon tunggal naik dari 3 daerah pada 2015 menjadi 37 daerah pada 2024 (Hukumonline, 2024), menandakan konsolidasi elite yang mempersempit pilihan pemilih.

Kajian ini bertumpu pada dua tradisi teori. Tradisi pertama adalah teori patron-klien klasik yang memandang relasi patron-klien sebagai ikatan dua pihak yang timpang: patron menyediakan perlindungan dan sumber daya, sedangkan klien membalasnya dengan loyalitas (Scott, 1972). Tradisi kedua adalah teori klientelisme elektoral, yang mendefinisikan klientelisme sebagai pertukaran kontingen antara keuntungan material dan dukungan politik (Hicken, 2011). Dalam konteks Indonesia, Aspinall dan Berenschot (2019) menyebut pola ini sebagai *freewheeling clientelism*, karena kandidat lebih bersandar pada tim pribadi dan jejaring informal daripada mesin partai. Jaringan itu tersusun berjenjang layaknya piramida broker (Aspinall *et al*., 2022). Muhtadi (2019) memperkirakan politik uang hanya memengaruhi sekitar sepuluh persen pemilih, tetapi angka itu cukup menentukan dalam persaingan ketat. Studi lain bahkan menunjukkan bahwa kandidat tetap membagikan uang lewat broker meski peluang memastikan suara pemilih kecil, sehingga praktiknya melampaui konsep klientelisme konvensional (Hicken *et al*., 2022).

Di Sulawesi Selatan, relasi patron-klien memiliki akar budaya yang panjang. Kabupaten Bone, bekas pusat Kerajaan Bone, menjadi contoh yang menonjol karena bangsawannya mampu bertahan melintasi berbagai rezim melalui perkawinan politik, jaringan sosial, dan relasi patron-klien (Mappangara, 2011). Modal simbolik gelar Andi menjadi aset terkuat bangsawan untuk meraup suara (Hartaman *et al*., 2020), dan kursi ketua Golkar Bone dijabat keturunan bangsawan sejak 1971 hingga 2024 (M. A. P. Putra & Hartaman, 2022). Pola itu berlanjut dalam Pilkada: keenam calon bupati pada 2013 berasal dari kalangan bangsawan, sementara Pilkada 2018 hanya diikuti satu pasangan calon (Ernawati, 2019; Irgiawan & Haryanto, 2023).

Penelitian terdahulu telah memberi gambaran rinci tentang mekanisme mobilisasi dalam Pilkada. Kepala desa dan tokoh masyarakat terbukti menjadi broker paling efektif (Aspinall & As'ad, 2015; Nastain & Nugroho, 2022), organisasi buruh dapat menjadi saluran mobilisasi (Gozali & Martini, 2026), dan desain jaringan kampanye ikut menentukan kemenangan (K. A. Putra *et al*., 2026). Kelebihan studi-studi tersebut terletak pada kedalaman data empiris. Kelemahannya, temuan masih tersebar per kasus, sebagian besar berfokus di Jawa dan Sumatra, serta cenderung menyoroti transaksi material. Tinjauan sistematis yang sudah ada membahas patronase secara umum lintas jenis pemilu dan tata kelola (Annisa & Situmorang, 2024; Kurniawan, 2025), sedangkan kajian Pilkada di wilayah Bugis lebih banyak menyoroti legitimasi bangsawan (Firman *et al*., 2022; Hartaman *et al*., 2020) tanpa mengaitkannya dengan literatur tentang broker.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini menawarkan tiga kebaruan. Sintesisnya dibatasi pada Pilkada, yang logika sumber dayanya berbeda karena pemenangnya menguasai birokrasi dan anggaran daerah. Artikel ini juga mempertemukan teori patron-klien kultural dengan teori klientelisme elektoral, lalu merumuskannya menjadi kerangka legitimasi–jaringan–transaksi untuk membaca Pilkada Bone hingga 2024. Dengan demikian, artikel ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana literatur memahami relasi patron-klien dalam Pilkada, mekanisme apa yang digunakan kandidat untuk memobilisasi dukungan melalui jaringan klientelistik, dan bagaimana temuan tersebut

tercermin dalam dinamika Pilkada di Kabupaten Bone.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain tinjauan literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif yang dilengkapi refleksi kasus. Tahapan seleksi dilaporkan mengikuti pedoman PRISMA 2020 (Page *et al*., 2021). Penelusuran dilakukan pada Google Scholar melalui *Publish or Perish*, Portal Garuda, DOAJ, dan Crossref dengan kata kunci "klientelisme", "patron-klien", "patronase", dan "politik uang" yang dipadukan dengan "Pilkada", beserta padanannya dalam bahasa Inggris. Setelah duplikat dihapus, judul dan abstrak disaring dengan kriteria: membahas klientelisme, patronase, atau relasi patron-klien dalam Pilkada atau mobilisasi elektoral lokal di Indonesia, terbit pada 2011–2026, telah melalui telaah sejawat, dan tersedia dalam teks lengkap. Studi tentang Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo dikeluarkan dari bukti kasus agar tidak tertukar dengan Kabupaten Bone.

Teks lengkap kemudian dinilai dengan lima kriteria mutu, yaitu kejelasan pertanyaan penelitian, transparansi metode, kecukupan data, keterkaitan dengan konsep klientelisme, dan kontribusi pada kajian Pilkada. Setiap kriteria diberi skor 0–2 dengan ambang minimal 6 dari 10, sehingga tersisa 23 studi. Data setiap studi diekstraksi ke dalam matriks yang memuat konteks, metode, aktor, sumber daya yang dipertukarkan, dan temuan utama, lalu dianalisis dengan sintesis tematik secara deduktif dan induktif. Kerangka hasil sintesis kemudian diterapkan pada data sekunder Pilkada Bone 2003–2024 yang bersumber dari studi terdahulu, data KPU yang dikutip media, dan pemberitaan media.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Korpus Studi

Dua puluh tiga studi yang lolos seleksi terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu sembilan kajian konseptual atau lintas daerah, delapan studi empiris tentang Pilkada atau pemilihan lokal di luar Bone, dan enam studi tentang Kabupaten Bone. Sebanyak 20 studi (87 persen) terbit pada 2018 atau sesudahnya. Sebagian besar studi menggunakan pendekatan kualitatif, dan hanya dua yang bertumpu pada data kuantitatif berskala luas, yakni survei pemilih nasional (Muhtadi, 2019) dan survei ahli di 38 kabupaten/kota (Berenschot, 2018). Ringkasan setiap studi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Studi yang Disintesis (n = 23)

Penulis (Tahun)	Konteks dan Lokasi	Metode	Temuan Kunci
Aspinall & Sukmajati (2015)	Pemilu legislatif 2014, berbagai daerah	Kualitatif multi-lokasi	Hampir semua caleg memakai strategi patronase; tim sukses menjadi broker
Berenschot (2018)	38 kabupaten/kota	Survei ahli dan etnografi	Klientelisme lebih intens di daerah yang ekonominya bergantung pada negara
Muhtadi (2019)	Nasional	Survei pemilih	Politik uang memengaruhi sekitar 10% pemilih meski kebocorannya tinggi
Aspinall & Berenschot (2019)	Nasional, dibandingkan dengan India dan Argentina	Etnografi dan survei	Klientelisme bersifat *freewheeling*; jaringan informal lebih menentukan daripada partai
Aspinall et al. (2022)	Indonesia, Filipina, Malaysia	Komparatif	Indonesia mengandalkan tim ad hoc yang menyerupai piramida broker
Hicken et al. (2022)	Indonesia	Studi empiris tentang broker	Kandidat tetap membayar broker meski kepastian suara rendah; praktiknya melampaui klientelisme
Regif & Pattipeilohy (2023)	Pilkada 2020, nasional	Studi kepustakaan	Ketidaknetralan ASN dipicu ikatan kekerabatan dan janji karier
Annisa & Situmorang (2024)	Indonesia	Tinjauan sistematis (30 dari 250 artikel)	Patronase tetap menjadi alat utama mobilisasi politik
Kurniawan (2025)	Indonesia	Tinjauan literatur	Petahana bertindak sebagai patron yang menempatkan pejabat; ASN mencari karier lewat jaringan
Aspinall & As'ad (2015)	Pilkada kabupaten	Wawancara elite desa dan data suara per desa	Patronase berbasis negara lebih efektif; kepala desa menjadi broker paling efektif
Cahyati & Lopo (2019)	Pemilihan kepala desa	Studi kasus kualitatif	Petahana membangun jaringan patronase dalam keseharian
Kelihu (2022)	Maluku Tengah, Pilkada 2007–2017	Observasi di 15 desa	Jaringan klientelisme menjadi jaringan siap pakai bagi kerabat elite
Nastain & Nugroho (2022)	Grobogan, Pilkada 2020 (calon tunggal)	Studi kasus kualitatif	Tokoh masyarakat dan kepala desa menjembatani petahana dengan pemilih
Fransisca et al. (2023)	Purbalingga dan Bontang, Pilkada 2020	Komparatif kualitatif	Penindakan politik uang oleh Bawaslu terhambat regulasi
Romli & Irawan (2024)	Wonosobo, Pilkada 2020	Studi kasus kualitatif	Koalisi gemuk membuat petahana gagal maju sebagai calon
Gozali & Martini (2026)	Kudus, Pilkada 2024	Kualitatif deskriptif	Mobilisasi melalui hierarki serikat pekerja hingga mandor pabrik
K. A. Putra et al. (2026)	Padang Pariaman, Pilkada 2024	Wawancara 13 informan	Penantang menang lewat jaringan jalur ganda; petahana kalah karena jaringan terpusat
Mappangara (2011)	Bone, 1811–1946	Sejarah (lontara dan arsip)	Bangsawan bertahan lewat perkawinan politik, jaringan sosial, dan relasi patron-klien

Penulis (Tahun)	Konteks dan Lokasi	Metode	Temuan Kunci
Ernawati (2019)	Bone, Pilkada 2003–2013	Wawancara dan data KPU	Ikatan bangsawan dengan Golkar; mutasi birokrasi sebagai balas jasa
Hartaman et al. (2020)	Bone, 2013–2018	Kualitatif	Modal simbolik gelar *Andi* menjadi aset terkuat; patronase birokrasi dan partai menopang kuasa bangsawan
Firman et al. (2022)	Bone, penelitian 2020	Wawancara mendalam	Nilai *akkarungeng* dan keyakinan *wija mapparenta* mengarahkan dukungan pada bangsawan
M. A. P. Putra & Hartaman (2022)	Bone, Partai Golkar	Studi kasus partai	Ketua Golkar Bone dijabat keturunan bangsawan sejak 1971
Irgiawan & Haryanto (2023)	Bone, Pilkada 2018	Kualitatif	Calon tunggal lahir dari dinamika partai dan kedekatan dengan elite partai

Sumber: Olahan peneliti dari 23 studi terpilih, 2026.

Konseptualisasi Relasi Patron-Klien dalam Pilkada

Literatur membaca relasi patron-klien dalam Pilkada melalui tiga lensa yang saling melengkapi. Lensa kultural-historis memandang relasi patron-klien sebagai struktur sosial yang awet, bertumpu pada rasa hormat, perlindungan, dan kewajiban timbal balik (Scott, 1972). Di Sulawesi Selatan, lensa ini tampak dalam kajian tentang ketahanan aristokrasi Bone dan legitimasi bangsawan dalam Pilkada (Firman *et al*., 2022; Hartaman *et al*., 2020; Mappangara, 2011).

Lensa elektoral-transaksional memahami klientelisme sebagai pertukaran kontingen antara sumber daya dan suara yang diperantarai broker (Hicken, 2011). Aspinall dan Sukmajati (2015) membedakan patronase, yakni materi yang dibagikan, dari klientelisme, yakni pola relasi yang menyalurkan materi tersebut. Pembedaan ini penting karena politik uang hanyalah salah satu wujud patronase, sedangkan jaringan yang menyalurkannya justru lebih menentukan.

Lensa ekonomi-politik membaca klientelisme sebagai fungsi penguasaan sumber daya negara. Intensitasnya lebih tinggi di daerah yang ekonominya bergantung pada anggaran pemerintah (Berenschot, 2018), dan patronase berbasis negara terbukti lebih efektif daripada pemberian lewat jaringan sosial (Aspinall & As'ad, 2015). Lensa ini menjelaskan keunggulan petahana yang mampu menempatkan pejabat dan memanfaatkan birokrasi (Kurniawan, 2025; Regif & Pattipeilohy, 2023). Ketiga lensa bertemu pada satu kesimpulan: relasi patron-klien dalam Pilkada kini bekerja sebagai jaringan berjenjang yang menyerupai piramida, dengan kandidat di puncak, broker di tengah, dan pemilih di dasar (Aspinall *et al*., 2022).

Mekanisme Mobilisasi Dukungan Elektoral

Arsitektur broker berlapis. Kandidat jarang berhubungan langsung dengan pemilih; mereka membangun tim sukses bertingkat hingga tempat pemungutan suara (Aspinall & Sukmajati, 2015; Aspinall *et al*., 2022). Broker paling efektif berasal dari unsur negara, terutama kepala desa (Aspinall & As'ad, 2015), seperti terlihat di Grobogan ketika tokoh masyarakat dan kepala desa menjembatani bupati petahana dengan pemilih (Nastain & Nugroho, 2022). Broker juga dapat berasal dari organisasi, misalnya hierarki serikat pekerja hingga mandor pabrik di Kudus (Gozali & Martini, 2026), maupun dari kekerabatan, seperti di Maluku Tengah (Kelihu, 2022). Desain jaringan pun berpengaruh. Pada Pilkada Padang Pariaman 2024, penantang menang lewat jaringan jalur ganda yang memisahkan partai dan relawan serta mengaktifkan kembali jaringan lama, sedangkan petahana kalah karena jaringan tunggal yang terpusat pada dirinya (K. A. Putra *et al*., 2026).

Ragam sumber daya yang dipertukarkan. Jenis yang paling kasatmata adalah uang tunai dan barang untuk individu menjelang pemungutan suara (Muhtadi, 2019; Nastain & Nugroho, 2022). Di atasnya terdapat barang kolektif dan proyek untuk komunitas, yang dalam literatur disebut *pork barrel* dan *club goods* (Aspinall & As'ad, 2015). Sumber daya yang kurang kasatmata adalah jabatan dan karier birokrasi. Mutasi pejabat setelah Pilkada berfungsi sebagai ganjaran bagi loyalis (Ernawati, 2019), sementara janji karier dan ikatan kekerabatan menjadi pendorong utama ketidaknetralan ASN (Regif & Pattipeilohy, 2023). Ada pula sumber daya simbolik berupa pengakuan dan kehormatan terhadap pemimpin dari kalangan sendiri (Firman *et al*., 2022).

Petahana dan patronase berbasis negara. Akses pada sumber daya negara memberi keuntungan struktural bagi petahana. Petahana merawat jaringan patronase dalam keseharian pemerintahan, jauh sebelum kampanye dimulai (Cahyati & Lopo, 2019), dan sebagai pejabat pembina kepegawaian dapat memengaruhi karier ASN (Regif & Pattipeilohy, 2023). Karena itu, larangan dalam Pasal 71 UU Pilkada yang baru berlaku sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (Republik Indonesia, 2016) sulit menjangkau jaringan yang telah terbentuk jauh sebelumnya.

Konsolidasi elite di tahap pencalonan. Klientelisme juga bekerja di hulu. Di Maluku Tengah, jaringan klientelisme menjadi modal turun-temurun bagi satu keluarga dalam tiga Pilkada berturut-turut (Kelihu, 2022). Di Wonosobo, koalisi gemuk yang dibangun partai pesaing membuat petahana gagal maju sebagai calon (Romli & Irawan, 2024). Bentuk paling ekstrem tampak pada calon tunggal di Grobogan 2020 dan Bone 2018, ketika partai-partai berhimpun mendukung satu pasangan (Irgiawan & Haryanto, 2023; Nastain & Nugroho, 2022).

Batas efektivitas dan otonomi pemilih. Pembelian suara hanya memengaruhi sekitar sepuluh persen pemilih, sementara banyak dana bocor di tangan perantara (Muhtadi, 2019). Kandidat tetap membayar broker karena kurangnya strategi alternatif, meskipun kepastian suara rendah (Hicken *et al*., 2022). Penindakan hukum pun belum efektif (Fransisca *et al*., 2023). Dengan demikian, patronase lebih tepat dipahami sebagai syarat untuk tetap kompetitif ketimbang jaminan kemenangan.

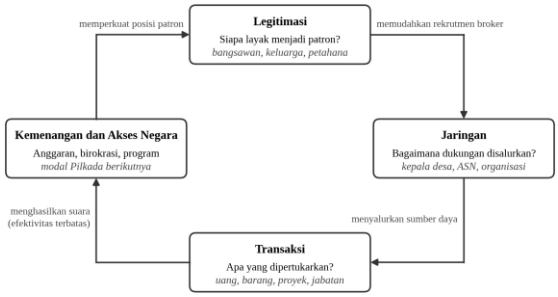
Kerangka Legitimasi–Jaringan–Transaksi

Kelima tema tersebut dirangkum ke dalam kerangka tiga lapis pada Tabel 2. Lapis legitimasi menjawab siapa yang dianggap layak menjadi patron, lapis jaringan menjawab bagaimana dukungan disalurkan, dan lapis transaksi menjawab apa yang dipertukarkan. Ketiganya saling menguatkan dalam sebuah siklus (Gambar 1): legitimasi memudahkan perekrutan broker, jaringan menyalurkan sumber daya, dan kemenangan membuka akses pada sumber daya negara yang kembali memperkuat legitimasi serta jaringan pada Pilkada berikutnya.

Tabel 2. Kerangka Legitimasi–Jaringan–Transaksi dalam Klientelisme Pilkada

Lapis	Pertanyaan Kunci	Wujud Utama	Aktor Utama	Studi Pendukung
Legitimasi	Siapa yang layak menjadi patron?	Status bangsawan, reputasi keluarga, posisi petahana	Kandidat, keluarga elite	Hartaman et al. (2020); Firman et al. (2022); Sari & Maulana (2025)
Jaringan	Bagaimana dukungan disalurkan?	Tim sukses berjenjang; broker negara, organisasi, dan kekerabatan	Kepala desa, tokoh masyarakat, ASN	Aspinall & As'ad (2015); Nastain & Nugroho (2022); K. A. Putra et al. (2026)
Transaksi	Apa yang dipertukarkan?	Uang, barang, proyek, jabatan, pengakuan simbolik	Broker dan pemilih	Muhtadi (2019); Hicken et al. (2022); Regif & Pattipeilohy (2023)

Sumber: Olahan peneliti, 2026.



Gambar 1. Siklus Reproduksi Klientelisme dalam Pilkada
Sumber: Olahan peneliti, 2026.

Refleksi Kasus Kabupaten Bone

Kabupaten Bone memperlihatkan ketiga lapis kerangka tersebut sekaligus, dan susunannya bergeser dari satu Pilkada ke Pilkada berikutnya. Tabel 3 merangkum lima pemilihan bupati di Bone sejak 2003.

Tabel 3. Pemilihan Bupati di Kabupaten Bone, 2003–2024

Tahun	Mekanisme	Jumlah Pasangan	Pemenang	Catatan
2003	Dipilih DPRD	–	Andi Muh. Idris Galigo	Diusung Golkar
2008	Langsung	3	Andi Muh. Idris Galigo (periode kedua)	Ketiga calon bupati bersaudara sepupu
2013	Langsung	6	Andi Fahsar M. Padjalangi – Ambo Dalle	Semua calon bupati bangsawan; pemenang meraih 191.524 suara
2018	Langsung	1 (calon tunggal)	Andi Fahsar M. Padjalangi – Ambo Dalle	232.955 suara (63,05%) melawan kolom kosong
2024	Langsung	3	Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin	199.954 suara (±49,9%); diusung koalisi sembilan partai

Sumber: Olahan peneliti dari *(Ernawati, 2019; Irgiawan & Haryanto, 2023; Merdeka.com, 2024; RMOL, 2025)*. Persentase 2024 dihitung dari total suara ketiga pasangan calon.

Legitimasi bangsawan sebagai tiket masuk. Di Bone, kepemimpinan dilekatkan pada keturunan To Manurung yang dikenal sebagai *wija mapparenta*, yaitu orang yang diyakini mewarisi darah pemimpin

(Firman *et al*., 2022). Keyakinan ini ditopang nilai *akkarungeng*, seperti *getteng* (keteguhan), *lempu* (kejujuran), *ada tongeng* (perkataan benar), *sipakatau* (saling memanusiakan), dan *temmappasilaingeng* (tidak membeda-bedakan). Kajian terbaru menunjukkan bahwa status keturunan bangsawan masih menjadi pertimbangan utama pemilih Bone, dan keluarga bangsawan aktif dalam mobilisasi massa serta pembentukan legitimasi (Sari & Maulana, 2025). Pada Pilkada 2013, keenam calon bupati berasal dari kalangan bangsawan, sementara figur non-bangsawan hanya tampil sebagai calon wakil bupati (Ernawati, 2019).

Jaringan partai, birokrasi, dan kekerabatan. Golkar lama menjadi kendaraan utama bangsawan Bone. Sejak 2003 hingga periode 2013–2018, pemenang pemilihan bupati selalu diusung Golkar (Ernawati, 2019), dan kepemimpinan Golkar Bone dipegang keturunan bangsawan (M. A. P. Putra & Hartaman, 2022). Birokrasi juga berfungsi sebagai jaringan patronase. Setelah Pilkada 2013, pejabat yang sebelumnya dinonjobkan kembali menduduki posisi penting, sedangkan loyalis kubu lawan disingkirkan, termasuk melalui penggantian 27 camat (Ernawati, 2019). Pola ini sejalan dengan temuan bahwa ikatan kekerabatan dan janji karier mendorong keberpihakan ASN dalam Pilkada (Regif & Pattipeilohy, 2023). Setelah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang pencalonan menjadi berbasis perolehan suara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024), koalisi lintas partai tetap menjadi jalan utama pencalonan.

Konsolidasi elite dan batas transaksi. Pada Pilkada 2018, hanya pasangan Andi Fahsar M. Padjalangi dan Ambo Dalle yang maju, sebagai hasil dinamika internal partai dan kedekatan kandidat dengan elite pimpinan partai pendukung (Irgiawan & Haryanto, 2023). Situasinya mirip Grobogan 2020, ketika petahana menghadapi kotak kosong (Nastain & Nugroho, 2022). Meski begitu, kolom kosong di Bone masih meraih sekitar 36,95 persen suara. Angka ini menandakan bahwa konsolidasi elite tidak otomatis diikuti konsolidasi pemilih. Bukti akademik tentang transaksi material dalam Pilkada Bone sendiri masih terbatas, sehingga menjadi celah riset yang perlu diisi.

Pilkada 2024: legitimasi tetap perlu, tetapi tidak lagi cukup. Ketiga calon bupati pada 2024 masih berasal dari kalangan bangsawan. Namun, Andi Rio Idris Padjalangi, keponakan mantan bupati Andi Fahsar Padjalangi, hanya menempati posisi ketiga dengan 86.717 suara. Kemenangan diraih Andi Asman Sulaiman, adik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dengan 199.954 suara, disusul Andi Islamuddin dengan 114.083 suara (Merdeka.com, 2024). Pasangan pemenang diusung koalisi sembilan partai (RMOL, 2025). Temuan di Wonosobo dan Padang Pariaman memperlihatkan pola serupa, yaitu koalisi besar dan desain jaringan dapat mengalahkan keunggulan petahana atau jaringan lama (K. A. Putra *et al*., 2026; Romli & Irawan, 2024).

Penulis membaca hasil ini sebagai pergeseran pada lapis jaringan. Jaringan lokal yang bertumpu pada satu keluarga bangsawan dan satu partai dominan tampak kalah bersaing dengan jaringan yang menghubungkan kandidat lokal dengan pusat kekuasaan nasional dan koalisi partai yang luas. Piramida patron-klien di Bone seolah bertambah satu tingkat, dengan patron di tingkat nasional, kandidat di kabupaten, broker di desa, dan pemilih di dasar. Bacaan ini sejalan dengan argumen bahwa akses pada sumber daya negara menentukan kekuatan jaringan klientelistik (Berenschot, 2018), meski masih perlu diuji melalui penelitian lapangan. Kajian ini terbatas pada korpus yang didominasi studi kualitatif dan refleksi kasus berbasis data sekunder.

4. Kesimpulan dan Saran

Tinjauan sistematis atas 23 studi menunjukkan bahwa klientelisme dalam Pilkada bekerja melalui tiga lapis yang saling menguatkan, yaitu legitimasi, jaringan, dan transaksi. Literatur memahami relasi patron-klien melalui lensa kultural-historis, elektoral-transaksional, dan ekonomi-politik, yang bertemu pada pandangan bahwa relasi tersebut kini bekerja sebagai jaringan berjenjang. Mobilisasi dukungan berlangsung melalui broker berlapis, ragam sumber daya dari uang hingga jabatan birokrasi, keunggulan petahana atas sumber daya negara, serta konsolidasi elite sejak pencalonan, meskipun efektivitasnya dibatasi kebocoran dana dan otonomi pemilih. Di Kabupaten Bone, status bangsawan berfungsi sebagai syarat masuk kontestasi, sedangkan Pilkada 2024 menunjukkan bahwa kemenangan semakin ditentukan oleh jaringan yang terhubung dengan pusat kekuasaan nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian lanjutan disarankan melakukan studi lapangan tentang kerja tim pemenangan Pilkada Bone 2024 di tingkat desa serta studi kuantitatif yang mengukur pengaruh status kebangsawanan dan pemberian material terhadap pilihan pemilih. Bagi Bawaslu dan pemerintah daerah, pengawasan perlu diperluas dari transaksi menjelang hari pemungutan suara ke netralitas ASN, mutasi pejabat, dan penyaluran

program sepanjang masa jabatan. Partai politik perlu membuka proses kandidasi agar kepemimpinan daerah tidak semata bergantung pada garis keturunan atau kedekatan dengan elite, sementara pendidikan pemilih dapat membingkai nilai *lempu* dan *sipakatau* sebagai dasar etis untuk menolak politik uang.

5. Referensi

Annisa, S., & Situmorang, B. (2024). The role of patronage in shaping Indonesia's political landscape. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, 11*(1), 111–133. https://doi.org/10.22146/jps.v11i1.101319

Aspinall, E., & As'ad, M. U. (2015). The patronage patchwork: Village brokerage networks and the power of the state in an Indonesian election. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 171*(2–3), 165–195. https://openresearch-repository.anu.edu.au/items/ea96ca41-7018-4374-8205-f21f0acd2274

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. PolGov.

Aspinall, E., Weiss, M. L., Hicken, A., & Hutchcroft, P. D. (2022). *Mobilizing for elections: Patronage and political machines in Southeast Asia*. Cambridge University Press.

Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative Political Studies, 51*(12), 1563–1593. https://doi.org/10.1177/0010414018758756

Cahyati, D. D., & Lopo, Y. H. L. (2019). Daily patronage politics: A village chief's route to power. *PCD Journal, 7*(2). https://doi.org/10.22146/pcd.51737

Ernawati. (2019). Pasang surut kuasa bangsawan dalam proses demokratisasi di Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12*(1), 1–14. https://doi.org/10.31947/jgov.v12i1.8013

Firman, S., Sukri, & Qomariyah, P. (2022). Pengaruh nilai budaya dalam politik lokal di Kabupaten Bone. *Politics and Humanism, 1*(1), 29–38.

Fransisca, I. A., Sardini, N. H., & Fitriyah. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang tahun 2020). *Journal of Politic and Government Studies, 12*(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38462

Gozali, R., & Martini, R. (2026). Political mobilization of cigarette factory workers in the 2024 Kudus regional election: Patron-client dynamics and electoral pragmatism. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial, 15*(1), 1769–1775. https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i1.7589

Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2020). The aristocrats power on local politic in the Regency of Bone 2013–2018. *Journal of Governance, 5*(1), 31–46. https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7033

Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science, 14*, 289–310. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508

Hicken, A., Aspinall, E., Weiss, M. L., & Muhtadi, B. (2022). Buying brokers: Electoral handouts beyond clientelism in a weak-party state. *World Politics, 74*(1). https://doi.org/10.1017/S0043887121000216

Hukumonline. (2024). *Dinamika keabsahan memilih kotak kosong di pilkada*. https://www.hukumonline.com/berita/a/dinamika-keabsahan-memilih-kotak-kosong-di-pilkada-lt6707981208c0f

Irgiawan, M. Z., & Haryanto. (2023). Dinamika menuju hadirnya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Bone tahun 2020. *Politik Islam, 2*(1). https://doi.org/10.31958/pi.v2i1.9508

Kelihu, A. (2022). Political clientelism, family power and conflict permanence in Pilkada: The case from Maluku. *PCD Journal, 10*(1), 75–108. https://doi.org/10.22146/pcd.v10i1.5417

Kurniawan, R. (2025). Patronage networks and power disparities: The legacy of political patronage in Indonesia's governance and democracy. *Jurnal Politik Profetik, 13*(1). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/53005

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*.

Mappangara, S. (2011). Bertahannya bangsawan Bone di tengah perubahan rezim, 1811–1946. *Masyarakat Indonesia, 37*(1), 185–210.

Merdeka.com. (2024). *Tumbangnya dinasti politik di Pilkada Sulsel 2024*. https://www.merdeka.com/peristiwa/read/794

0047/tumbangnya-dinasti-politik-di-pilkada-sulsel-2024

Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3

Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi kuasa dan suara: Politik patron klien pada Pilkada langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik, 13*(1), 167–184. https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Putra, K. A., Valentina, T. R., & Irawati. (2026). Comparative study of political network structures and brokers in regional elections. *JOELS: Journal of Election and Leadership, 7*(2), 209–218. https://doi.org/10.31849/joels.34503

Putra, M. A. P., & Hartaman, N. (2022). Political dominance of the nobles in the Golkar Party of Bone Regency. *Journal of Contemporary Local Politics, 1*(2).

Regif, S. Y., & Pattipeilohy, A. (2023). Penyalahgunaan peran aparatur sipil negara (ASN) dalam electoral misconduct pada Pilkada di Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu, 6*(1), 38–48. https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.62

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

RMOL. (2025). *Profil Bupati Bone, adik Mentan Amran Sulaiman yang naikkan PBB hingga 300 persen*. https://rmol.id/politik/read/2025/08/22/677185/profil-bupati-bone-adik-mentan-amran-sulaiman-yang-naikkan-pbb-hingga-300-persen

Romli, L., & Irawan, C. (2024). Incumbent versus big coalition: Incumbent's failure as regional head candidate in Wonosobo. *Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 15*(1), 41–55. https://doi.org/10.22212/jp.v15i1.4475

Sari, I., & Maulana, M. A. (2025). Kemenangan keluarga bangsawan pada Pilkada Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tahun 2018. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM, 6*(2), 786–794.

Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review, 66*(1), 91–113. https://doi.org/10.2307/1959280

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).